

# Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

## PERAN PENGURUS LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM) TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

**Darusman, Vikri Rahmaddani**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau  
darusman@uin-suska.ac.id

### *Abstract*

*This study aims to see whether there is a role for MFI management on community participation. The population used in this study was the entire community in Kampung Bandar, Senapelan District, Pekanbaru City, amounting to 760 respondents. As for the sampling random sampling (simple sample) that is 76 respondents. The analytical model used in this study is a quantitative analysis model using questionnaires distributed to respondents. Meanwhile, for data processing, SPSS 21 was used with regression and correlation equations. From the results of the analysis, the coefficient value of 0.280 is in the interval 0.20-0.40 which means that the relationship is low. With the hypothesis  $H_a$  is accepted,  $H_o$  is rejected. The results obtained indicate that there is a low role in the role of MFI administrators in community participation.*

**Keywords:** Role, LKM Boards, Society, Participation

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada peran pengurus LKM terhadap partisipasi masyarakat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini seluruh masyarakat yang berada di Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang berjumlah 760 responden. Sedangkan untuk pengambilan sampel random sampling (sampel sederhana) yaitu 76 responden. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis kuantitatif dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada responden. Sedangkan untuk pengolahan data digunakan SPSS 21 dengan persamaan regresi dan korelasi. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien sebesar 0,280 berada pada interval 0,20-0,40 yang berarti rendah hubungannya. Dengan hipotesa  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak. Hasil yang didapat ini menunjukkan bahwa terdapat peran yang rendah di dalam peran pengurus LKM terhadap partisipasi masyarakat.*

**Kata Kunci:** Peran, LKM, Masyarakat, Partisipasi

## **Pendahuluan**

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan

permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha, permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat.<sup>1</sup>

Lembaga Kswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan organisasi jasa sukarelawan untuk membantu sesama pemerintah dalam mengurangi masalah sosial, tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat agar mereka bisa merasakan kehidupan yang lebih layak lagi dan bisa mengurangi beban masyarakat baik di segi ekonominya, pembangunannya, kesejahteraannya dan lain sebagainya, oleh sebab itu dengan adanya LKM ini pemerintah sangat terbantu didalam aspek untuk memberdayakan masyarakat, namun disamping itu juga tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan terutama permasalahan terhadap masyarakat itu sendiri, oleh sebab itu perlu adanya kerja sama yang sangat erat antara LKM dan masyarakat didalam mengurangi masalah sosial ini, sedangkan pemerintah hanya sebagai nahkoda penggerak dari semua permasalahan yang ada, jadi LKM dan masyarakat harus mendukung ataupun saling berpartisipasi kepada pemerintah didalam mengentaskan atau mengurangi permasalahan sosial yang ada di masyarakat, agar semuanya bisa dilaksanakan sesuai yang diharapkan, apabila sudah saling berpartisipasi untuk meningkatkan ataupun mengurangi permasalahan sosial yang ada secara otomatis semuanya akan berjalan dengan lancar.

---

<sup>1</sup>*Pedoman umum program kota tanpa kumuh* hlm 1

Partisipasi pada prinsipnya merupakan keikutsertaan atau peran serta atau orang-orang yang menanggulangi suatu masalah yang menjadi tanggung jawab karena menyangkut kebutuhan dan kepentingan orang banyak, artinya melalui partisipasi ini kita benar-benar menyadari bahwa didalam proses pembangunan bukan hanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat tertentu saja, tetapi kita sebagai masyarakat harus bisa melibatkan diri kita untuk saling mendukung dan berpartisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan kita.

Dalam upaya membangun LKM modal sosial di Kelurahan Kampung Bandar perlu adanya menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang kerja sama sesama warga untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Serta menjadi motor penggerak, LKM harus dapat di percaya baik oleh warga masyarakat setempat maupun pihak lain, oleh sebab itu LKM sudah harus memiliki modal tersebut diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat. Dengan begitu program berjalan seperti sistem penghijauan, pembangunan infrastruktur dan struktur perlu dilakukan.

Kampung Bandar merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Senapelan kota Pekanbaru dimana Kampung Bandar ini terdiri dari 8 RT dan 29 RW. Dalam hal ini permasalahan yang terjadi pada seluruh LKM yang ada di Kampung Bandar ini yaitu belum mampunya LKM menjadi motor penggerak masyarakat karena masih banyak terdapat permasalahan yang terjadi di dalam keanggotaan LKM tersebut belum bisa kompak sesama anggota LKM, belum bisa membangun sikap dan perilaku masyarakat agar menjadi masyarakat yang memiliki hubungan kepercayaan antara mereka sendiri dan bisa di percaya pihak luar. Karena hubungan kepercayaan merupakan unsur utama dalam membangun kerja sama, oleh sebab itu masyarakat kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembangunan sosial ini, karena LKM nya saja kurang memiliki kepercayaan sesama anggotanya sehingga secara otomatis masyarakat pun sulit untuk mengikuti kegiatan serta ikut berperan untuk mensukseskan program KOTAKU salah satunya di dalam pembangunan sosial yang mana hanya sebagian saja atau kelompok tertentu saja yang ikut sebagian lagi tidak mau berpartisipasi di dalam pembangunan sosial tersebut, karena sudah jelas bahwasannya program KOTAKU ini untuk memberdayakan masyarakat serta mensejahterakan

masyarakat dan lebih penting lagi yaitu mengedepankan hubungan peran masyarakat agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Adanya permasalahan terhadap LKM berperan tetapi belum optimal, yang dimaksud disini yakni anggota LKM tidak semua yang ikut melaksanakan tugasnya hanya beberapa orang saja, Masyarakat belum berpartisipasi dalam pembangunan sosial, hanya kelompok tertentu saja yang berpartisipasi, yang dimaksud disini tidak semua bagian dari masyarakat yang berpartisipasi melainkan hanya sebagian kecil yang sadar akan pentingnya partisipasi didalam pembangunan sosial tersebut, Kurangnya peran pengurus LKM di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dalam program kotaku yaitu sebagian melaksanakan kewajibannya, sebagian lagi tidak melaksanakan kewajibannya, sebagian ikut pelatihan sebagian lagi tidak ikut pelatihan yang diadakan oleh program kotaku, kondisi ini sejalan dengan penelitian Nano, tentang "*Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Utara Tegal Jawa Tengah*".<sup>2</sup> Adapun peran yang dilakukan LSM di desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu peran sebagai pendidik, peran sebagai perwakilan, peran sebagai pengembangan keterampilan teknis, maka dari itu hasil dari penelitian Nano adalah pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan LSM Desa melalui badan usaha Dian Mandala telah membawa kemajuan dan pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan masyarakat lainnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mengikutsertakan masyarakat ambil andil didalam pemberdayaan masyarakat ini, selain itu Penelitian yang dilakukan Irayani tentang "*peranan lembaga keswadayaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan rintis kecamatan limapuluh kota Pekanbaru*". Adapun yang akan ditelitinya adalah peran yang dilakukan LKM dalam pemberdayaan masyarakat, maka dari hasil penelitian Irayani adalah peran LKM ini bisa memberdayakan masyarakat untuk mencapai hidup yang lebih baik.<sup>3</sup>

Testimoni kajian dari dua hasil penelitian di atas, diperkuat dengan teori yang menyebutkan bahwa peran pengurus LKM menuntut koordinasi dan kerja sama serta peran yang seimbang antara instansi pemerintahan setempat dan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat peran pengurus

---

<sup>2</sup> Nano, "*Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Utara Tegal Jawa Tengah*", (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2008)

<sup>3</sup> Irayani "*peranan lembaga keswadayaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan rintis kecamatan limapuluh kota Pekanbaru*", (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2017)

LKM terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial adalah dengan pendekatan partisipatif. Yang mana pendekatan ini mendorong bagaimana mendorong pengurus LKM dan masyarakat saling bekerjasama dalam pembangunan sosial. Selain itu dengan adanya peran pengurus LKM ini terhadap partisipasi masyarakat meningkatkan kerjasama antara pengurus LKM dengan masyarakat sehingga pembangunan sosial dapat di laksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini masyarakat setempat harus di sadarkan bahwa mereka memiliki peran juga terhadap pembangunan yang ada di daerah mereka sendiri, agar semua pembangunan yang ada bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang di harapkan.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam maupun dari luar, dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan) serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang di capai. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk memaksimalkan atau meningkatkan peran pengurus LKM terhadap partisipasi masyarakat setempat dalam pembangunan sosial.

Dari perpaduan teori dan praktik di atas, maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana peran pengurus LKM, partisipasi masyarakat, dan pembangunan sosial di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dengan harapan hasil kajian ini dapat menjadi referensi untuk mengetahui sejauh mana peran pengurus LKM terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial, dan begitu juga agar masyarakat mengetahui bagaimana berpartisipasi kepada instansi pemerintahan dalam pembangunan sosial.

## **Metode**

Secara umum, Penelitian ini di lakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan penyebaran angket. Penyebaran angket adalah salah satu alat untuk mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan dari pihak yang ingin di teliti atau di tanyakan. Penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis

berdasarkan prosedur statistik.<sup>4</sup> Untuk mengetahui informasi yang akurat dalam melakukan penelitian tentang peran pengurus LKM terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial, penulis menentukan informan dari stakeholder yang terkait, terdiri dari pemerintah setempat atau lembaga yang terkait dan masyarakat Kampung Bandar. Dalam kajian ini penulis menentukan informan dengan Teknik pengambilan sampel menurut Arikunto jika populasi kurang dari 100 maka semua populasi dijadikan sampel jika populasi melebihi 100 maka diambil sampel 10-15%, 20-25% atau lebih. Dalam hal ini penulis mengambil sampel sebanyak 10% yakni 76 kepala keluarga.<sup>5</sup> Maka penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sample secara acak (*Random Sampling*). Metode pengambilan data yang di gunakan adalah Questioner disebarkan kepada masyarakat, adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya penulis menentukan teknik validasi data, adapun yang dipilih adalah Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel.

Kemudian hasil korelasi di bandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. Pengukuran di katakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas:

1. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan terhadap skor total dinyatakan valid.
2. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (uji 2 di sisi dengan sig.0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total dinyatakan tidak valid.

3. Uji Realibilitas

Uji realibitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur,apakah alat pengukur yang di gunakan dapat di andalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut di ulang.Untuk uji realibitas di gunakan teknik *Croanbach's Alpha*,dimana satu instrumen dapat di katakan handal (reliable) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih.

---

<sup>4</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 38

<sup>5</sup>Arikunto,2005. *Prosedur suatu pendekatan praktik*. Jakarta PT Rineka Cipta hlm 117

Kemudian setelah uji validitas data kita melakukan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji statistik koefisien korelasi dengan menggunakan beberapa cara:

1. Analisis regresi linear sederhana

Analisis ini untuk menganalisis data penelitian mengenai peran pengurus LKM terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial.

2. Persamaan regresi linear

Bentuk persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$\boxed{Y = a + Bx}$$

Keterangan:

Y = Variabel tidak bebas atau variabel terikat

X = variabel bebas

a = Nilai intercept konstan atau harga Y bila X = 0

b = Koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan.

3. Koefisien korelasi

Metode analisis korelasi *product moment* yaitu korelasi yang berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat pengaruh suatu variabel dengan variabel lain.<sup>6</sup>teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif kuantitatif menjelaskan permasalahan yang diteliti dengan bentuk angka-angka dengan rumusan korelasi product moment:

$$r_{xy} = \frac{n (\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi Product Moment

n = jumlah individu dalam sampel

X = angka mentah untuk variabel X

Y = angka untuk variabel Y

$\sum XY$  = jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y

---

<sup>6</sup>Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung CVAlfaabeta, 2006, hlm 109-110

$\sum X$  = jumlah seluruh skor X

$\sum Y$  = jumlah seluruh skor Y

4. Interpretasi Koefisien Korelasi Product Moment

No	Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
1	0,90-1,00	Sangat Kuat
2	0,70-0,90	Kuat
3	0,40-0,70	Cukup
4	<b>0,20-0,40</b>	Rendah
5	0,00-0,20	Sangat Rendah

**Hasil dan Pembahasan**

**1. Peran Pengurus LKM**

Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memilikikedudukan dalam masyarakat. Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Pemeranan ialah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang.<sup>7</sup>

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan(status). Artinya seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatuperan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain salingtergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpaperan. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyaimacam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebutberarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagimasyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur prilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkanperbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapatmenyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompok.<sup>8</sup>

Adapun pengertian menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

<sup>7</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: ModernEnglish Press, 2002), Cet. ke-1, hlm. 1132.

<sup>8</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. ke-3, hlm. 158-159.

Menurut Veitzhal peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran perilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan berjalan seiring pekerjaan tersebut, juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.<sup>9</sup> Menurut Wibowo peran merupakan sebagai serangkaian pola perilaku yang diharapkan dihubungkan pada seseorang yang menguasai posisi tertentu dalam unit sosial.<sup>10</sup>

Menurut Keith Davis peran adalah pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain, peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini dalam sistem sosial.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran itu mencakup tiga hal:

- a. Perana meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>12</sup>
- d. Peran Nyata dan Peran yang di Anjurkan.

---

<sup>9</sup> Veitzhal Rivai, Deeddy Mulyadi, *Kepimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), hlm. 156

<sup>10</sup> Wibowo, *Perilaku dalam Organisasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 169-170

<sup>11</sup> Keith Davis, Jhon W. Newstrom, *Perilaku dalam Organisasi*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama), hlm 51

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. ke-22, hlm. 269.

Hakikatnya peran juga bisa dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Jadi dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki suatu atau kedudukan tertentu.

Lembaga kswadayaan masyarakat (LKM) adalah: organisasi swasta yang secara umum bebas dari intervensi pemerintah. Ia di dirikan dengan sebuah idealisme untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, perbaikan kesejahteraan kelompok marginal, perlawanan terhadap kesenjangan dan kemiskinan, perlindungan lingkungan atau sumber daya alam, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.

Ada beberapa pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas yaitu:

#### 1. Penguatan Kapasitas Individu

Pengembangan kapasitas individu adalah segala upaya untuk memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi agar lebih efektif dan efisien, baik di dalam etnisnya maupun dalam lingkup global. Pengembangan kapasitas pribadi, meliputi pengembangan kapasitas kepribadi, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.

#### 2. Penguatan Kapasitas Entitas (Kelembagaan)

Berbeda dengan pengembangan kapasitas individu yang lebih menekankan kualitas individu untuk dirinya sendiri, pengembangan kapasitas entitas/organisasi lebih ditekankan kepada pengembangan mutu entitas/organisasi.

#### 3. Penguatan Kapasitas Sistem (jejaring)

Perkembangan peradaban telah menunjukkan pentingnya jejaring antar pemangku kepentingan. Bahkan jejaring telah berkembang menjadi sumber daya yang harus terus menerus di kembangkan demi terwujudnya tujuan/efektivitas organisasi/individu. Terkait dengan hal itu, pengembangan kapasitas sistem jejaring, meliputi:

1. Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama.
2. Interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

Peran merupakan salah satu aspek dari kedudukan(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia

menjalankan suatu peranannya, oleh sebab itu LKM memiliki beberapa peran tertentu, adapun peran LKM tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencairan diri dengan masyarakat sasaran.
2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan.
3. Pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran.<sup>13</sup>

Ketiga macam peran tersebut dikembangkan menjadi beberapa peran lain yang lebih rinci:

1. Pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan, dalam tahapan ini, setiap LKM harus mampu memainkan perannya pada kegiatan-kegiatan:
  - a) Diagnosa masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar diperlukan (*real need*) masyarakat penerima manfaatnya.
  - b) Analisis tentang motivasi dan kemampuan masyarakat sasaran untuk melakukan perubahan, sehingga upaya perubahan yang direncanakan mudah diterima dan dapat dilaksanakan sesuai dengan sumberdaya (dana, pengetahuan/keterampilan, dan kelembagaan) yang telah dimiliki masyarakat penerima manfaatnya.
  - c) Pemilihan obyek perubahan yang tepat, dengan kegiatan awal yang benar-benar diyakini pasti berhasil dan memiliki arti yang sangat strategis bagi keberlangsungannya perubahan-perubahan lanjutan di masa-masa berikutnya.
  - d) Analisis sumberdaya yang tersedia dan atau dapat digunakan oleh penyuluh/fasilitator yang bersama-sama penerima manfaatnya untuk perubahan seperti yang direncanakan.
  - e) Pemilihan peran bantuan yang paling tepat yang akan dilakukan oleh penyuluh/fasilitator, baik berupa bantuan keahlian, dorongan/dukungan untuk melakukan perubahan, pembentukan, perubahan, pembentukan kelembagaan atau memperkuat kerjasama masyarakat atau menciptakan suasana tertentu bagi terciptanya perubahan.

---

<sup>13</sup> Totok, Mardikanto, *Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: AlfaBeta, 2015, hlm 140

2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Dalam tahapan ini, kegiatan yang harus dilakukan oleh LKM adalah:
  - a) Menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat penerima manfaatnya.
  - b) Menunjukkan kepada masyarakat penerima manfaatnya tentang pentingnya perubahan-perubahan yang harus dilakukan, dengan menunjukkan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang belum dirasakan oleh masyarakat penerima manfaatnya.
  - c) Bersama-sama masyarakat, menentukan prioritas kegiatan, memobilisasi sumberdaya (mengumpulkan dana, menyelenggarakan pelatihan, membentuk dan mengembangkan kelembagaan), dan memimpin (mengambil inisiatif, mengarahkan, dan membimbing) perubahan yang direncanakan.
3. Memantapkan hubungan dengan masyarakat penerima manfaatnya, melalui upaya-upaya:
  - a) Terus menerus menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan masyarakat penerima manfaatnya, terutama tokoh-tokohnya (baik tokoh formal maupun tokoh informal).
  - b) Bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat memantapkan upaya-upaya perubahan dan merancang tahapan-tahapan perubahan yang perlu dilaksanakan untuk jangka panjang.
  - c) Terus-menerus memberikan sumbangan terhadap perubahan yang profesional melalui kegiatan penelitian dan rumusan konsep perubahan yang akan ditawarkan.<sup>14</sup>

Jadi bisa kita simpulkan peran pengurus LKM terhadap masyarakat sangat memiliki pengaruh penting didalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa bekerja sama didalam membangun kehidupan yang lebih layak lagi serta memupuk kembali kesadarann masyarakat agar bisa berpartisipasi di dalam program-program yang telah dibuat agar nantinya berjalan dengan lancar dan bisa mendapat pengaruh

---

<sup>14</sup> Ibid hlm 143

positif dari masyarakat yang banyak. Adapun peran dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan yang dilakukan oleh LKM dalam menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

## **2. Partisipasi Masyarakat**

Pengertian secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan oleh beberapa seseorang atau sekelompok dalam satu kegiatan. Pengertian seperti itu nampak selaras dengan pengertian dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

Menurut Bornby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat Webster, Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri Theodorson<sup>15</sup>. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antar individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Menurut Beal menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya ransangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang oksogen (*exogenous change*).

Menurut Verhagen menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat.

Menurut Mubyarto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah sebagai kesediaan untuk berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan pribadi.

Adapun menurut Peter Salim dan Yenny Salim partisipasi adalah hal yang berkaitan dengan turut berperan dalam suatu kegiatan. Jadi partisipasi pada prinsipnya adalah keikutsertaan atau peran serta atau orang-orang yang menanggulangi suatu masalah yang menjadi tanggung jawab karena menyangkut kebutuhan dan kepentingan orang banyak, artinya melalui partisipasi ini kita benar-benar menyadari bahwa didalam

---

<sup>15</sup>*Ibid, Hlm.81*

proses pembangunan bukan hanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat tertentu saja, tetapi kita sebagai masyarakat harus bisa melibatkan diri kita untuk saling mendukung dan berpartisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan kita.<sup>16</sup>

### **3. Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Pada dasarnya suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam maupun dari luar, dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan) serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang di capai. Karena itu, Yadav (UNAPDI) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan pembangunan yaitu:

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu di tumbuhkan melalui di bukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

b) Partisipasi dalam melaksanakan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali di artikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus di artikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan beragam bentuk pengorbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan di terima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Di samping itu yang sering di lupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil di selesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus di nikmati dalam jangka panjang.

---

<sup>16</sup>[Child-island.blogspot.co.id/2012/03/teori-partisipasi-masyarakat](http://Child-island.blogspot.co.id/2012/03/teori-partisipasi-masyarakat).

c) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat di perlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat di capai seperti yang di harapkan, tetapi juga di perlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat di perlukan.

d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering di terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Akan tetapi partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti di dapatkan oleh masyarakat sasarnya. Padahal seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang di laksanakan menjadi sia-sia.

Jadi adapun lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah bagaimana masyarakat mampu untuk melibatkan diri di dalam proses pembangunan baik itu dari segi mengambil keputusan di dalam proses pembangunan, melaksanakan kegiatan maksud nya disini masyarakat harus berpartisipasi di dalam pembangunan baik itu dari sumbangan tenaganya, sumbangan dananya, maupun melibatkan diri didalam pemantauan atau mengevaluasi didalam pembangunan, serta bagaimana masyarakat mampu berpartisipasi didalam pemanfaatan pembangunan-pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintahan sehingga semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang banyak.<sup>17</sup>

#### **4. Bentuk- bentuk Partisipasi**

Ada beberapa bentuk partisipasi yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipasi berbasis aset komunitas dari pemikiran menuju penerapan*, Depok:2012 hlm 145

Menurut Dusseldorp mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat.
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Menfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Jadi untuk melibatkan masyarakat di dalam meningkatkan partisipasi mereka harus bisa sadar bahwa partisipasi itu sangat penting dan harus diiringi dengan keinginan meningkatkan kepedulian terhadap sesamanya.

Selain itu, Slamet juga mengemukakan adanya keragaman partisipasi berdasarkan input yang disumbangkan, dan keikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan seperti berikut:

1. Ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan, serta ikut pula memanfaatkan hasil pembangunan.
2. Ikut memberikan input, tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, tetapi ikut memanfaatkan hasil pembangunannya.
3. Ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan tetapi tidak ikut memanfaatkan hasilnya.
4. Ikut menerima imbalan dan menerima hasil pembangunan, tetapi tidak turut memberikan input.
5. Ikut memberikan input, meskipun tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, dan juga tidak ikut serta menikmati manfaat hasil pembangunan.

Jadi dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bentuk partisipasi nomor 2 seharusnya lebih banyak dikembangkan, dan model 1 hanya di berlakukan bagi masyarakat lapis bawah, sedang partisipasi model 5 seharusnya jangan diharapkan dari warga masyarakat lapisan bawah. Di samping itu, model 4 seharusnya tidak boleh terjadi, meskipun dalam praktik akan sangat sulit dihindari.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Android browser [blogspot.co.id/2017/10/lingkup-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan](http://blogspot.co.id/2017/10/lingkup-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan).

## **Simpulan**

Lembaga Keswadayaan masyarakat membentuk unit-unit pengelola yaitu unit pengelola keuangan, unit pengelola ekonomi dan unit pengelola lingkungan kemudian membentuk kelompok KSM sebagai pelaksana kegiatan. Dalam penyampaian informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh LKM dengan cara penempelan di setiap tempat strategis salah satunya di kelurahan dimana masyarakat mudah menemukan informasi tersebut.

Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien sebesar 0,280 berada pada interval 0,20-0,40 yang berarti rendah hubungannya. Dengan hipotesa  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak. Hasil yang didapat ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang rendah di dalam peran pengurus LKM terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan peran pengurus LKM kurang didalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial. Jadi dapat disimpulkan jika pengurus LKM tidak berperan dalam pembangunan maka masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam masalah kegiatan sosial.

Dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) hanya sebesar 0,078 atau (7,8%). Hal ini menunjukkan secara simultan Peran Pengurus LKM Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sosial Memiliki Hubungan yang rendah yaitu 7,8%. Sedangkan faktor lain yang belum diteliti didalam penelitian ini sebesar 92,2% dan tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## **Referensi**

- Abdulsyani 2002, *Sosiologi Sistematis, Teori, Dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kuantitatif*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Drzubaedi 2013, *pengembangan masyarakat wacana & praktek*, Rineka Cipta
- Oos M. Anwas *pengembangan masyarakat di era Global*, Jakarta
- Hamzah 2008, *Teori Motivasi Dan Pengukurannya*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hasibuan 2010, *Malayu, Organisasi Dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hendrojogi 2004, *Koperasi : Asas-Asas Dan Teori Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Isbandi Rukminto 2012. *Adi intervensi komunitas*, Rineka Cipta, Depok
- Jalaluddin 2012, *Psikologi Agama Memahami Prilaku Dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mankiw 2006, N. Gregory, *Makro Ekonomis Edisi 6*, Erlangga, Jakarta
- Marsan 2007, Loenardo D. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Karya Utama, Surabaya.
- Mubyarto 2002, *Membangun System Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta
- Notoatmodjo S 2010, *Metode Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta  
*Pedoman umum program kota tanpa kumuh* hal 1
- Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya 2008*, Kencana, Jakarta
- Putong, Iskandar 2011, *Pengantar Ekonomi*, Galia Indonesia, Jakarta
- Riduan 2013, *Pengantar Statistika Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, Dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Riduan, Sunarto 2013, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi, Dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Soetomo 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto 2006, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sukirno, Sadono 2013, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tjahya Sumodiningrat 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Zainal Abidin Ahmad 2014, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bulan Bintang, Jakarta